

SOSIALISASI UPAYA PENCEGAHAN *FINANCIAL DISTRESS* PADA BPKAD PROVINSI SUMATERA SELATAN

Evada Dewata¹, Yuliana Sari², Devi Febrianti³, Hadi Jauhari⁴

¹²³⁴Politeknik Negeri Siwijaya,

evada78@polsri.ac.id, yuliana.sari@polsri.ac.id,

devi.febrianti@polsri.ac.id, ha.di@polsri.ac.id

Received: 09-11-2023	Revised: 11-11-2023	Approved: 24-11-2023
----------------------	---------------------	----------------------

ABSTRAK

Penting bagi Pemerintah Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah untuk menyediakan dana pelayanan publik dan masalah *financial distress* menjadi hambatan kesulitan keuangan daerah yang mengakibatkan ketidakmampuan pemerintah untuk memberi pelayanan sesuai standar minimal mutu pelayanan, untuk itu kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini ditujukan bagi pemerintah daerah khususnya Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKAD) yang tugasnya merumuskan kebijakan teknis dibidang *pengelolaan keuangan* dan aset *daerah* diantaranya anggaran, belanja, akuntansi dan aset *daerah*. Kegiatan ini dilaksanakan oleh tim pengabdian dari Politeknik Negeri Sriwijaya pada tahun 2023. Adapun tujuan kegiatan ini untuk memberikan pengetahuan dan bukti-bukti teoritis tentang *financial distress* dan pencegahannya. Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan pada bulan Oktober 2023 yang dihadiri oleh pimpinan dan pegawai BPKAD di kantor beralamat di jalan Kapten A Rivai Palembang. Pelaksanaan kegiatan melalui beberapa tahapan mulai dari *pre-test* dan *post-test*, pemberian materi dan diskusi bersama peserta. Capaian kegiatan ini diantaranya pegawai pemerintahan khususnya BPKAD memiliki pengetahuan terkait *financial distress*, serta mengetahui faktor-faktor yang dapat mencegah terjadinya *financial distress* sehingga keuangan pemerintah dapat terjaga dan terealisasi dengan tepat.

Kata Kunci: *Financial Distress*; Keuangan Daerah; Pencegahan

PENDAHULUAN

Implementasi otonomi daerah dan desentralisasi fiskal di Indonesia sudah dimulai sejak tahun 2001, yang dalam penerapannya diharapkan mendorong kesejahteraan dan kemandirian pemerintah daerah. Salah satu Pemerintah daerah di Indonesia yaitu Provinsi Sumatera Selatan secara administratif terdiri dari 13 *Pemerintah Kabupaten* dan 4 *Pemerintah Kota*. Jika dilihat dari realisasi belanja pemerintah daerah Provinsi Sumatera Selatan, selama tahun 2019-2021, menunjukkan realisasi belanja daerah hanya sebesar 17% dari total belanja daerah, sedangkan untuk belanja pegawai sebesar 19% (<https://sumsel.bps.go.id/>, 2023). Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang dalam pelaksanaan tugasnya melakukan penatausahaan keuangan dan pencatatan akuntansi untuk menghasilkan laporan keuangan secara lebih cepat, dan memperhitungkan analisis laporan keuangan untuk perencanaan anggaran ditahun-tahun berikutnya. Tentu permasalahan seperti tidak tercapaian target belanja ataupun pendapatan, memerlukan perhatian serius bagi pemerintah daerah terkait kemungkinan dan indikasi mengalami kebangkrutan. Kondisi keuangan pemerintah daerah menunjukkan besarnya kapasitas pemerintah daerah untuk mendanai layanannya secara berkelanjutan (Nollenberger et al. (2003) dan kebangkrutan menjadi masalah

yang sangat serius karena jika benar-benar mengalami kebangkrutan, maka pemerintah daerah tersebut akan mengalami keterpurukan. Sebelum mengalami kebangkrutan, maka pemerintah daerah akan mengalami suatu kondisi kesulitan keuangan yang disebut dengan *Financial distress*.

Peraturan Pemerintah RI No.58 Tahun 2005 dalam Pengelolaan Keuangan Daerah menunjukkan belanja daerah sebagai kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. *Financial Distress* seharusnya menjadi salah satu pertimbangan dalam kebijakan belanja daerah terutama belanja langsung yang bersinggungan dengan penyediaan kebutuhan masyarakat melalui belanja barang dan jasa, belanja modal dan belanja pegawai langsung. Secara empiris dalam pelaksanaan belanja langsung lebih mencerminkan untuk belanja transfer kesejahteraan. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan undang-undang (Wulandari, Nugraeni, Wafa (2018) dan diketahui bersama belanja pegawai memiliki porsi terbesar dalam struktur belanja pegawai.

Financial distress menunjukkan ketidakmampuan pemerintah untuk menyediakan dana yang berakibat ketidakmampuan dalam memberi pelayanan pada publik secara maksimal (Jones dan Walker, 2007). Beberapa faktor yang mempengaruhi *financial distress* Pemerintah Daerah seperti menurut Rinaldi (2022) bahwa kemandirian keuangan daerah menjadi hal penting dalam pelaksanaan otonomi daerah yang harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri. Besarnya tingkat kemandirian keuangan juga menunjukkan besarnya kemampuan pemerintah dalam merencanakan belanja modal untuk meningkatkan pelayanan prima (Elfiyana & Arza,2022). Selanjutnya menurut Pranoto, Hasthoro & Nurwiyanta (2022), derajat desentralisasi fiskal juga berpengaruh negatif terhadap *financial distress* pada Pemerintah Daerah karena Pemerintah Daerah yang memiliki derajat desentralisasi yang tinggi memiliki banyak kewenangan dan kebijakan untuk mengoptimalkan belanja modal untuk pelayanan public, kondisi ini juga didukung semakin lama berdirinya satu pemerintahan daerah maka diharapkan pemerintah daerah tersebut telah mampu mengatasi segala hambatannya dengan pengalaman financial yang didapatnya (Sari, Dewata dan Jauhari,2023).

Selain itu beberapa faktor keuangan juga menunjukkan adanya pengaruh terhadap *financial distress* contohnya pendapatan asli daerah yang menunjukkan seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai dari tahun ke tahun, dan Keberhasilan keuangan pemerintah daerah dalam menghasilkan pendapatan dan mencegah kekurangan pendanaan dapat digambarkan dengan rasio efektivitas yang meningkat atau menurun yang dialami oleh laporan keuangan pemerintah daerah (Pradana,2023). Selain itu besarnya hutang menjadi awal terjadinya gagal bayar artinya semakin besar jumlah hutang maka semakin tinggi terjadinya *financial distress* (Pangku & Radjak, 2021). Tingkat pelayanan yang diberikan oleh pemerintah kepada Masyarakat sebagai indikator pencapaian kinerja pemerintah yang tercermin dalam kebijakan pemerintah untuk rakyat dengan optimalisasi alokasi belanja modal dalam rangka mencapai tujuan organisasi (Sari dan Arza,2019) dan kondisi ini dapat tercapai

dengan adanya reformasi perubahan bentuk tata kelola pemerintahan yang sentralisasi menjadi struktur desentralisasi (Hasthoro, Saksono, dan Widiyanti, 2021).

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dimaksudkan untuk mensosialisasikan upaya-upaya yang dapat dilakukan khususnya pada pemerintah daerah Sumatera Selatan melalui BPKAD Provinsi Sumatera Selatan yang memiliki fungsi dalam hal pengelolaan keuangan dan aset daerah. Memprediksi potensi kebangkrutan/*financial distress* sangat penting sebagai bahan evaluasi kinerja pemerintah daerah yang selama ini terjadi. Untuk perlu mengetahui penyebab dan upaya-upaya yang harus dilakukan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan agar tidak terjadi kebangkrutan/*financial distress*?. Tujuan dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah untuk melakukan sosialisasi terkait upaya pencegahan kondisi *financial distress* sejak dini pada Badan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BKPAD) Provinsi Sumatera Selatan agar nantinya pemerintah daerah dapat melakukan tindakan-tindakan untuk mengantisipasi kondisi yang mengarah pada kebangkrutan, seperti diungkap Sari, Dewata dan Jauhari (2023) bahwa penting bagi pemerintah daerah mencari alternatif pembiayaan untuk melaksanakan program kerja dengan memprioritaskan pada belanja modal agar dapat mengurangi terjadinya *financial distress*. Kegiatan pengabdian masyarakat ini diharapkan dapat bermanfaat bagi peserta untuk meningkatkan pengetahuan tentang pentingnya pengelolaan komponen belanja daerah secara optimal dan upaya menghindari *financial distress* serta dapat meningkatkan kemampuannya dalam menyusun alokasi belanja sesuai proporsi dengan melihat rasio keuangan yang telah diperhitungkan dari tahun sebelumnya agar *financial distress* tidak terjadi dan pelayanan publik terjaga.

METODE KEGIATAN

1. Lokasi Dan Waktu Kegiatan

Kegiatan pengabdian pada masyarakat ini ditujukan bagi Kepala dan pegawai BPKAD yang merupakan perangkat daerah yang melaksanakan fungsi urusan penunjang pemerintahan daerah dalam hal pengelolaan keuangan dan aset daerah, dan sekaligus sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD) dan Pejabat Penatausahaan. Kantor BPKAD Prov Sumatera Selatan beralamat di Jl. Kapten A. Rivai No.51 Sungai Pangeran Kec. Ilir Tim. I Kota Palembang, Sumatera Selatan 30127.

2. Metode Pelaksanaan Kegiatan

Metode yang digunakan dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini sebagai berikut:

1. Metode ceramah digunakan oleh tim pengabdian untuk menjelaskan materi yang berkaitan dengan materi pengelolaan belanja daerah secara optimal, komponen belanja daerah, potensi *financial distress*, perhitungan rasio keuangan serta upaya-upaya pencegahan.
2. Metode diskusi digunakan untuk memperdalam materi bahasan baik bentuk tanya jawab secara perorangan maupun perwakilan peserta.
3. Metode Pendampingan dilakukan pada saat peserta melakukan praktek materi sosialisasi.
4. Metode Monitoring dilakukan setelah pelaksanaan kegiatan sosialisasi untuk

memastikan peserta telah menerapkan materi sosialisasi dalam pengelolaan keuangan dan alokasi belanja dan untuk memberikan solusi lanjutan terhadap permasalahan yang ditemukan pada saat penerapan.

Pelaksanaan kegiatan pengabdian dilakukan dengan beberapa tahapan, yaitu:

1. Tahap Awal, tim melakukan rapat pertemuan pembagian tugas antar tim, termasuk penyiapan penjadualan pelaksanaan sosialisasi, penyiapan materi, dan penyiapan soal pre-test dan post-test.
2. Tim melakukan kordinasi dan komunikasi dengan pihak BPKAD Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka penyiapan peserta sosialisasi yang terlibat.
3. Pelaksanaan sosialisasi yang dikordinasikan dengan panitia dan peserta sosialisasi.
4. Monitoring dan evaluasi materi sosialisasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan diawali dengan sambutan dan pengenalan oleh Ketua tim pengabdi dan juga perwakilan Kepala dan pegawai BPKAD Provinsi Sumatera Selatan. Sebelum dimulai paparan materi, diawali dengan pre-test berkenaan dengan pengelolaan belanja daerah dan *financial distress*. Setelah pre-test dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh Ketua Tim menjelaskan tentang pengertian dan dampak dari *financial distress*, serta dijelaskan materi tentang bagaimana cara memprediksi potensi *financial distress* untuk evaluasi kinerja pemerintah daerah. Berdasarkan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh tim diharapkan memberikan manfaat positif kepada BPKAD Provinsi Sumatera Selatan sebagai mitra kegiatan, pembahasan hasil akan dijabarkan sebagai berikut:

- a) Peserta kegiatan memperoleh masukan mengenai upaya pencegahan *financial distress*;
- b) Peserta kegiatan diberikan pemahaman strategi meminimalisasi terjadinya *financial distress* pada pemerintah daerah;
- c) Tim dan peserta kegiatan berdiskusi membahas beberapa kasus dan permasalahan yang terjadi.
- d) Setelah kegiatan sosialisasi dan sesi tanya jawab dilaksanakan, terlihat bahwa para peserta kegiatan mulai memahami terkait penyebab dan upaya-upaya pencegahan yang bisa dilakukan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan agar tidak terjadi kebangkrutan/ *financial distress*.

Beberapa dokumentasi kegiatan pelatihan dalam rangka pengabdian kepada masyarakat dapat dilihat pada gambar 1 berikut ini.



Gambar 1. Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat

Rangkaian kegiatan yang terlaksana telah disampaikan mencakup materi-materi yang dianggap relevan dan dapat menambah pengetahuan bagi para peserta. Selama sesi diskusi, diketahui jika selama ini belum ada upaya untuk menjelaskan secara lebih terperinci perihal faktor, dampak dan bagaimana Tindakan pencegahan *financial distress* bagi pengelolaan keuangan daerah. Peserta yang hadir menanggapi kegiatan ini secara positif yang dianggap mampu memberi petunjuk-petunjuk baru dalam penyusunan perencanaan dan pengelolaan laporan keuangan. Tabel 1 berikut ini menghimpun beberapa respon peserta untuk materi yang telah disampaikan.

Tabel 1. Topik Diskusi Sosialisasi Upaya Pencegahan Kondisi Financial Distress Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah

No	Materi	Umpan Balik
1	Pendalaman pengetahuan tentang <i>financial distress</i> dan komponen belanja daerah	Menjelaskan lebih detail dengan contoh dalam perencanaan dan bukti empiris komponen belanja dan studi <i>financial distress</i> .
2	Identifikasi factor-faktor terjadi dan pencegahan <i>financial distress</i>	Perlu kehati-hatian dalam mengidentifikasi terjadinya <i>financial distress</i>
3	Sinkronisasi uraian dokumen komponen belanja daerah.	Perlu optimalisasi koordinasi dan kerjasama dalam menyusun perencanaan anggaran pendapatan dan belanja.

Sumber: Diskusi, 2023

Dari kegiatan sosialisasi diperoleh tanggapan dari para peserta dan diharapkan mampu memberi tambahan pengetahuan dan mendorong peningkatan kapasitas pegawai BPKAD Provinsi Sumatera Selatan. Ada feedback positif dan antusias dengan upaya menunjukkan kemampuan mereka dalam berperspektif argumentasi untuk beberapa permasalahan yang telah terjadi dan solusi untuk mengatasinya. Pada akhir kegiatan, pihak BPKAD Provinsi Sumatera Selatan berharap agar dimasa mendatang ada kegiatan pengabdian yang sifatnya lebih intens dan mendalam bagi para pegawai pemerintah daerah lainnya.

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini telah dilaksanakan oleh tim pengabdian Dosen berjalan dengan lancar dan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pegawai BPKAD selaku mitra. Peserta sosialisasi ini adalah para pegawai yang memiliki tupoksi dalam perencanaan dan penganggaran keuangan pemerintah keuangan daerah. Kegiatan ini bertujuan memberikan pengetahuan serta sharing bukti-bukti empiris terkait *financial distress*. Rekomendasi untuk penguatan selanjutnya yaitu perlunya tetap dijalan kerjasama kemitraan antara perguruan tinggi bersama pemerintah daerah dalam mengawal pembangunan daerah sesuai tri dharma perguruan tinggi dalam menerapkan aplikasi dan teknologi menuju perubahan ke arah yang lebih baik.

PENGHARGAAN

Terima kasih kepada Politeknik Negeri Sriwijaya yang telah memfasilitasi baik dalam pendanaan dan perizinan kepada tim pengabdian, sebagai bagian dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat pendanaan DIPA Polstri tahun 2023. Penghargaan juga bagi BPKAD Provinsi Sumatra Selatan selaku mitra dalam kegiatan pengabdian kepada Masyarakat tahun 2023 ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Elfiyana, E., & Arza, F. I. (2022). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Faktor Keuangan terhadap Kondisi Financial Distress di Indonesia. *JURNAL EKSPLORASI AKUNTANSI*, 4(2), 425-437
<https://sumsel.bps.go.id/indicator/13/557/1/realisasi-belanja-pemerintah.html>.
Diakses tgl 22 maret 2023
- Nollenberger, K., M.S. Groves, dan M.G. Valente. 2003. *Evaluating Financial Condition: A Handbook for Local Government*. International 25 City/County Management Association. Washington, DC.
- Jones, Stewart dan R., G., Walker. 2007. *Explanators of Local Government Distress*. *ABACUS*. 43(3): 396-418.
- Sari, Yuliana., Evada Dewata & Hadi jauhari. 2023. *Financial Distress Pada Pemerintah Provinsi: Kajian Kemandirian Keuangan Dan Umur Pemerintah Daerah*. Vol. 11No. 1 (2023): Simposium Nasional Akuntansi Vokasi (SNAV)
- Sari, M and F. I. Arza, "Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kondisi Financial Distress Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota Se-Indonesia Periode," *Wahana Riset Akuntansi*, vol. 7, no. 1, pp. 1425-1436, 2019, [Online]. Available: <http://ejournal.unp.ac.id/index.php/wra/issue/archive>
- Republik Indonesia. 2005. *Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta: Legalitas.
- Pangku, M., & Radjak, L. I. (2021). Analysis of Financial Distress in The Provincial Government of Gorontalo in 2014-2018. *JSAP : Journal Syariah and Accounting Public*, 4(1), 1-8. <https://doi.org/10.31314/jsap.4.1.1-8.2021>
- Pradana, I. (2023). Financial Distress Ditinjau Dari Rasio Keuangan Dan Karakteristik Pemerintah Daerah. *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, 3(5), 978-985.
- Pranoto, F. C., Hasthoro, H. A., & Nurwiyanta, N. (2022, August). Determinan Financial Distress Pemerintah Daerah. In *Prosiding Seminar Nasional Hasil Riset (SNHR)*.

- Rinaldi, “Kemandirian Keuangan Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah,” Jurnal EKSOS, vol. 8, no. 2, pp. 105–113, 2012, Accessed: Jun. 22, 2022. [Online]. Available: http://riset.polnep.ac.id/bo/upload/penelitian/penerbitan_jurnal/06-eksos%204%20-%20udin%20rinaldi.pdf
- Wulandari, Nugraeni, Wafa (2018). Faktor-faktor yang mempengaruhi financial distress Pemerintah Daerah. *Jurnal Riset Akuntansi Mercuri Buana*, 4(2), 100-105.